

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA KOJA DOI

Sarif¹, Danar Aswun², Petrus Kpalet³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, IKIP Muhammadiyah Maumere

Email : Syarif20@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat nelayan oleh pemerintah Desa Koja Doi Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka 2) Apa saja kendala yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Koja Doi Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Desa Koja Doi dan Masyarakat Nelayan Desa Koja Doi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian mengatakan bahwa 1) Peran pemerintah di Dusun Koja Doi, telah efektif menjalankan tugasnya sebagai pemerintah khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan, yang dimana pemerintah tersebut telah memberikan bantuan yang cukup kepada masyarakat nelayan yang ada di dusun Koja Doi seperti bantuan kelompok dari pembibitan katonik, bantuan nelayan seperti mesin, perahu, dan jaring penangkapan ikan, tetapi tidak semua masyarakat nelayan mendapatkan bantuan tersebut 2) Kendala Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan nelayan di Desa Koja Doi. Karena anggaran merupakan faktor penggerak seluruh kegiatan elemen lembaga pemerintahan.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to describe 1) the role of the village government in empowering fishing communities by the government of Koja Doi Village, East Alok District, Sikka Regency 2) What are the obstacles that affect the empowerment of fishing communities in Koja Doi Village, East Alok District, Sikka Regency. This research is a qualitative research. The subjects of this study were the Koja Doi Village Government and the Koja Doi Village Fisherman Society. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that 1) The role of the government in Koja Doi Hamlet has effectively carried out its duties as the government, especially the Fisheries and Marine Service, where the government has provided sufficient assistance to the fishing community in Koja Doi Hamlet such as group assistance from catonic nurseries, fishermen's assistance such as machines, boats, and fishing nets, but not all fishing communities get this assistance 2) Constraints to the Government's Efforts in Empowering Fishermen Communities, Budget constraints are one of the important factors in implementing the fishermen empowerment program in Koja Doi Village. Because the budget is a driving factor for the smooth running of all elements of government institutions.

Keywords: Role of Village Government, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau besar dan kecil dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km² atau sekitar 63% sama dengan $\frac{3}{4}$ dari keseluruhan wilayah Indonesia. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Luas perairan tersebut, termasuk di dalamnya laut, memiliki potensi produksi letrai ikan laut yang cukup besar, dengan asumsi sekitar 6,51 juta ton/tahun atau 8,2 % dari total potensi produksi ikan laut dunia. Dari gambaran tersebut menunjukkan potensi kekayaan negara Indonesia pada sektor perikanan dan kelautan.

Pemerintah Desa berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Menurut Soerjono Soekanto (2002 : 243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan seperti halnya Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 perubahan dari UU No. 27 Tahun 2007 amanat pemberdayaan masyarakat nelayan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meskipun hanya menyebutkan pemberdayaan masyarakat pesisir, tetapi pada umumnya nelayan merupakan salah satu dari bagian masyarakat pesisir. Pada pasal 63 tentang “Pemerintah dan Pemerintah Daerah” berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi. Masyarakat nelayan merupakan salah satu kelompok sosial dalam masyarakat kita di daerah kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor kompleks yang saling terkait serta merupakan sumber utama yang melemahkan kemampuan masyarakat dalam membangun wilayah dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan kawasan pesisir (Kusnadi et al, 2007) agar pemberdayaan masyarakat nelayan mencapai sasaran yang maksimal di perlukan pengaturan yang lebih spesifik di tingkat daerah sampai ke tingkat desa dalam bentuk produk hukum yang berkaitan dengan Pemberdayaan Nelayan seperti halnya di Desa Koja Doi.

Desa Koja Doi adalah salah satu dari sebagian besar daerah pesisir di kepulauan maumere yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan sedangkan yang lainnya bekerja sebagai petani, pegawai, dan pedagang. Dalam memenuhi kebutuhan yang tergantung dari hasil laut atau hasil tangkap. Kehidupan nelayan selalu diungkapkan keterbelakangan, baik dari segi mata pencaharian maupun cara berfikir dan sikap yang masih tradisional. Hal ini disebabkan kurangnya keterampilan, nelayan.

KERANGKA TEORITIK

Pengertian Pemerintah Desa

Asrori (2014: 114), Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah. Adon Nasrullah Jamaludin, (2015: 109-111) Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan.

Peran Pemerintah Desa

Menurut Soerjono Soekanto (2002:168) Peran merupakan seperangkat perilaku yang seharusnya dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Jika seseorang menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya dia memainkan peran itu, baik sebagai seorang pekerja atau sebagai masyarakat. Inu Kencana Syafie (2013:124) Pemerintah adalah salah satu elemen negara yang berperang penting dan bertanggung jawab dalam mengatur roda pemerintahan untuk mencapai tujuan suatu negara. Dalam hal ini pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, karena sejauh ini para nelayan telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. (Taliziduhu, Ndraha, 2011:157). Inu Kencana Syafie (2013:130) Peran pemerintah daerah diposisikan dalam kegiatan manajemen yang memberikan informasi, pengetahuan serta pendidikan tentang pengelolaan perusahaan perikanan. Harapannya dalam kelembagaan yang terbentuk untuk mendorong modal sosial nelayan sehingga lebih memiliki kekuatan secara sosial dengan ekonomi yang mandiri. Pembinaan dan pelatihan diperlukan sebagai peran penting pemerintah untuk menciptakan masyarakat nelayan yang lebih mandiri.

Fungsi Peran Pemerintah Desa

Inu Kencana Syafie, (2013:142) Peranan adalah konsep yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Nelayan

Menurut Keban dan Lele dalam (Mulyono, 2017: 56) Secara estimologis kata pemberdayaan berasal dari kata dasar yakni “daya” yang berarti kemampuan atau kekuatan. Pemberdayaan pada hakikatnya dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk menuju keberdayaan. Juga dapat diartikan sebagai proses memperoleh daya / kemampuan / kekuatan dan juga pentransferan daya / kekuatan / kemampuan dari pihak yang berdaya kepada pihak yang kurang berdaya untuk menuju keberdayaan.

Pemberdayaan menurut (Chatarina Rusmiyati, 2011:16), pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya, atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Totok Mardikato (2010:126) Dalam praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) atau penanggulangan kemiskinan (poverty reduction). Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (income generating).

Totok Mardikato (2010:135) Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis, adalah suatu proses untuk menolong kelompok masyarakat dan individu yang kurang beruntung untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan lain dengan cara menolong mereka untuk belajar, dan menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik, memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main), dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam meningkatkan

kapasitas masyarakat dalam bersaing sehingga tidak ada yang menang dan kalah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat yaitu upaya untuk mengajarkan kelompok atau individu bagaimana bersaing dalam peraturan.

METODE

Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah Moleong (2011: 6). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bersifat kualitatif, karena dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi saat ini secara sistematis dan menuntut untuk dicarikan jalan keluarnya. Penelitian ini membahas masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Koja Doi Kecamatan Alok Timur Kabupten Sikka

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitin. Sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dua, antara lain primer dan data sekunder.

Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisi data dalam penelitian dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

DISKUSI

Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Koja Doi

Peran pemerintah di Dusun Koja Doi, telah efektif menjalankan tugasnya sebagai pemerintah khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan, yang dimana pemerintah tersebut telah memberikan bantuan yang cukup kepada masyarakat nelayan yang ada di dusun Koja Doi seperti bantuan kelompok dari pembibitan katonik, bantuan nelayan seperti mesin, perahu, dan jaring penangkapan ikan, tetapi tidak semua masyarakat nelayan mendapatkan bantuan tersebut. Pemerintah Desa Koja Doi telah memberikan bantuan kepada masyarakat Koja Doi yaitu bantuan bedah rumah dan bantuan perumahan pesisir ada 5 perumahan yang telah diberikan dari pemerintah untuk masyarakat nelayan. Dinas Perikanan dan Kelautan juga memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan dan memberikan pelatihan kepada masyarakat nelayan.

Kendala Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan nelayan di Desa Koja Doi. Karena anggaran merupakan faktor penggerak kelancaran seluruh kegiatan elemen-elemen lembaga pemerintahan. Keterbatasan

anggaran merupakan permasalahan klasik suatu program pemberdayaan tidak dapat berjalan dengan baik serta belum memenuhi kebutuhan nelayan. Maka pemerintah masih berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan agar dalam program pelaksanaan pemberdayaan bisa berjalan dengan baik.

Selain keterbatasan anggaran, kualitas sumber daya manusia di Dusun Koja Doi juga yang sangat rendah karena tingkat pendidikan nelayan pada umumnya adalah SD atau SMP bahkan ada yang tidak tamat dan sama sekali tidak menempuh pendidikan, pengetahuan yang didapatkan hanya berdasarkan pada pengalaman. Keadaan lain yang berkontribusi terhadap kemunduran tingkat kesejahteraan nelayan adalah kebiasaan atau pola kehidupan. Nelayan tidak bisa dikatakan malas, karena jika dilihat dari daur kehidupan nelayan yang selalu bekerja keras.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah Desa Koja Doi dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Dusun Koja Doi telah mampu menjalankan perannya dengan efektif, Peran tersebut dapat dilihat dan dirasakan melalui program-program yang telah Pemerintah berikan kepada masyarakat nelayan.
2. Upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Dusun Koja Doi dalam meningkatkan ekonomi masyarakatnya telah meningkat dikarenakan dengan adanya upaya pemberdayaan masyarakat nelayan yang diberikan dari pemerintah, pendapatan masyarakat di Dusun Koja Doi mengalami peningkatan karena pemerintah tersebut telah memberikan bantuan berupa penyediaan sarana dan prasarana serta memberikan dana modal usaha kepada nelayan, dengan adanya bantuan tersebut masyarakat nelayan di Dusun Koja Doi sangat terbantu dan peningkatan ekonomi masyarakat Koja Doi dapat meningkat dari tahun sebelum adanya pemberdayaan.
3. Kendala pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Dusun Koja Doi terdapat beberapa kendala diantaranya adalah keterbatasan anggaran yang dimana permasalahan klasik suatu program pemberdayaan tidak dapat berjalan dengan baik serta belum memenuhi kebutuhan nelayan di Dusun Koja Doi. Disamping itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan dimana yang dimana pola hidup masyarakat nelayan bersifat konsumtif, pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder

DAFTAR PUSTAKA

- Adon Nasrullah Jamaludin. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Pustaka setia. Surakarta.
- Asrori (2014). *Pemerintah Desa*. Jakarta: Bumi Aksara
- Inu Kencana Syafii, (2013) *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Prakasa.
- Kusnadi. (2009). *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Mulyadi, (2005) *Ekonomi Kelautan* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, (2002) *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Totok Mardikato, (2010) *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat* Yogyakarta: Universitas Pers.